

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muhammad Mursi merupakan Presiden Mesir ke-lima. Muhammad Mursi merupakan salah satu pemimpin Ikhwanul Muslimin yang memiliki pengaruh sangat kuat di kalangan masyarakat umum. Muhammad Mursi mulai aktif di Ikhwanul Muslimin sejak 1977. Sejak aktif di Ikhwanul Muslimin, Muhammad Mursi berulang kali masuk penjara, baik di masa Presiden Anwar Saddat (1970 – 1981), maupun di era Presiden Hosni Mubarak (1981 – 2011) atas tuduhan melakukan gerakan bawah tanah untuk menggulingkan pemerintahan. Sebab, sepanjang tiga rezim Mesir mulai dari Presiden Gamal Abdul Nasser (1953 – 1970), berlanjut rezim Presiden Anwar Saddat (1970 – 1981), hingga rezim Presiden Hosni Mubarak (1981 – 2011), Ikhwanul Muslimin dinyatakan sebagai organisasi terlarang.¹

Memasuki dekade kedua abad ke-21, kawasan Timur Tengah ditandai dengan geliat rakyat menggugat berbagai kepemimpinan nasional mereka. Peristiwa ini dikenal sebagai kebangkitan Dunia Arab atau Arab Spring. Yang terjadi adalah gelombang revolusi unjuk rasa dan protes yang terjadi di Dunia Arab. Para pengunjuk rasa di Dunia Arab mendengungkan slogan rakyat ingin menumbangkan rezim ini. Rangkaian ini berawal dari protes pertama yang terjadi di Tunisia tanggal 18 Desember 2010 setelah pembakaran diri Mohamed Bouazizi dalam protes atas korupsi polisi dan jaminan

¹ Yudha Manggala Putra, Profil Mohammed Mursi, Presiden terpilih Mesir, <http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/12/06/24/m64pt7-profil-mohammed-mursi-presiden-terpilih-mesir>, di akses tanggal 01 Jan 16 Pukul 00:00 WIB

kesehatan. Dengan kesuksesan protes di Tunisia, gelombang protes selanjutnya menjalar ke Aljazair, Yordania, Mesir, dan Yaman, kemudian ke negara – negara lain.²

Pada perjalanan pemerintahan Mesir, rezim Husni Mubarak berkuasa kurang lebih tiga puluh tahun dengan gayanya yang otoriter. Hal-hal paling mendasar dari sistem otoritarianisme yang diterapkan Mubarak adalah pemerintahan yang sewenang-wenang menggunakan hukum dengan segala instrumen negara yang memaksa untuk memonopoli kekuasaan dan menolak hak-hak politik kelompok lain untuk meraih kekuasaan. Sebelum Mubarak, pemerintahan Mesir dipegang oleh Jendral Mohammad Naguib lewat kudeta militernya tahun 1952 yang melibatkan Kelompok Perwira Bebas (*Free Officer*). Naguib tak lama memerintah karena segera digeser oleh Nasser (1952-1970), kemudian diteruskan Anwar Sadat (1970-1981), dan Hosni Mubarak (1981-2011) setelah Sadat ditembak mati pada acara parade militer. Perlu diketahui mereka semua adalah tentara, dan bagian dari kelompok Perwira Bebas (*Free Officer*).

Pada 25 Januari 2011 terjadi demonstrasi yang dimulai oleh pemuda menentang kepemimpinan Mubarak dan menuntut perubahan, massa menamakan hari itu dengan Yawm Al Ghadab (hari kemarahan). Pergolakan yang terjadi di sejumlah provinsi seperti Bani Suez, Mansoura, Tanta, Alexandria, dan Port Said. Aksi ini membawa pesan penting yaitu tidak inginnya rakyat dengan kepemimpinan totaliter secara politik, rakyat yang berkumpul di lapangan Tahrer sehari-hari membuktikan bahwa Mesir sedang mengalami kebuntuan politik yang

² Sidik Jatmika, Pengantar Studi Kawasan Timur Tengah, Yogyakarta: Maharsa, 2014, hlm. 178-179.

luar biasa.³ Kesalahan lain Mubarak adalah terlena begitu lama dengan kekuasaannya ditambah Mubarak ingin mewariskan kekuasaan pada putranya Gamal Mubarak, proses politik itu memperjelas ke arah pembentukan dinasti politik. Rakyat juga bosan dengan gayanya yang reaktif terhadap kritik yang mudah menangkap para pengkritik.⁴

Hampir seribu orang berkumpul di alun – alun Tahrir, Kairo. Sehingga pada malam 28 Januari, pemerintah Mesir menghentikan koneksi internet demi menghambat gerakan protes. Namun hal ini tidak menurunkan semangat, justru puluhan ribu protes segera mengemuka di beberapa kota besar hingga Presiden Hosni Mubarak berhasil diturunkan dari jabatannya sebagai presiden Mesir. Bersama dengan berakhirnya kekuasaan Mubarak, Mesir memasuki babak baru dalam dunia pepolitikannya. Untuk pertama kalinya pemilihan presiden di Mesir dipilih melalui pemilihan umum sebagai wujud dari demokrasi yang sesungguhnya.

IM (Ikhwanul Muslimin) merupakan organisasi yang berperan penting dalam Revolusi Mesir 2011. Pada revolusi 25 Januari 2011, Muhammad Mursi dipenjarakan bersama 34 orang pemimpin Ikhwanul Muslimin lainnya ditangkap dan dipenjarakan. Penangkapan tersebut dikarenakan agar Muhammad Mursi dan Ikhwanul Muslimin tidak ikut serta dalam revolusi yang sedang terjadi negara Mesir tersebut. Akan tetapi, Muhammad Mursi hanya dipenjarakan dalam 2 hari saja atas bantuan rekan – rekan Ikhwanul Muslimin lainnya.

³ Zuhairi Misrawi, "Mesir di Persimpangan Jalan," Kompas, 11 Februari 2011, hlm. 6.

⁴ "Mubarak Terlenna Begitu Lama Peringatan Bagi Pemimpin Yang Lengah," Kompas, 7 Februari 2011, hlm. 1.

Dua bulan kemudian, Dewan Syura Ikhwanul Muslimin menunjuk Muhammad Mursi menjadi Ketua Partai Kebebasan dan Keadilan yang dibentuk Ikhwanul Muslimin yang merupakan sayap politik organisasi tersebut. Penunjukan dirinya sebagai ketua secara otomatis membuatnya mundur dari keanggotaan al-Irsyariid Ikhwanul Muslimin, namun tetap menjabat sebagai anggota Dewan Syura yang beranggota 110 pemimpin Ikhwanul Muslimin.⁵

Dalam waktu setahun, Muhammad Mursi berhasil membawa Ikhwanul Muslimin dengan partainya dalam memperoleh suara dalam pemilihan umum di Mesir sebanyak 47%. Perolehan suara yang cukup besar tersebut mengantarkan Muhammad Mursi menjadi Presiden.

Pelantikan Muhammad Mursi, mencatat sejumlah sejarah baru di Mesir. Pertama, inilah kali pertama Mesir dipimpin presiden yang dipilih melalui proses yang demokratis. Kedua, inilah kali pertama tokoh Ikhwanul Muslimin menjadi orang nomor satu di Mesir sejak organisasi tersebut didirikan Hasan al-Banna, 84 tahun silam. Ketiga, inilah kali pertama Mesir dipimpin presiden berlatar belakang sipil, sejak negara itu berbentuk Republik pada 1952. Presiden Mursi merupakan presiden ke-lima di era republik. Empat presiden sebelumnya berlatar belakang militer, yaitu Muhammad Naguib (1953-1954), Gamal Abdul Nasser (1956-1970), Anwar Sadat (1970-1981), dan Hosni Mubarak (1981-2011).

Setelah satu tahun memimpin, terjadi kembali pergolakan politik di Mesir pada tahun 2013. Dalam pergolakan politik tersebut, sebagian masyarakat Mesir seperti kelompok Sekuler, Liberal, dan Kristen Koptik atau anti Islam menuntut penggulingan Presiden Mursi,

⁵ Hepi Ani Bastoni, DR. Mursi, Presiden yang Hafal Qur'an , Bogor:Pustaka Al-Bustam,2012hlm. 18.

yang dinilai bersikap diskriminatif (banyaknya anggota Ikhwanul Muslimin yang menduduki jabatan di pemerintahan) dan Presiden Mursi dinilai tidak memenuhi janji reformasi, perbaikan ekonomi, dan politik.⁶

Padahal dalam hal jabatan, Presiden Mursi telah menawarkan kepada pihak – pihak oposisi (Liberal dan Sekuler) untuk jabatan – jabatan tertentu tetapi ditolak oleh oposisi, dan dalam hal perbaikan ekonomi dan politik, Presiden Mursi sebenarnya telah menempuh berbagai cara untuk memperbaiki kondisi dalam negeri Mesir, seperti melakukan kebijakan – kebijakan untuk meningkatkan ekonomi Mesir. Hal ini pun terealisasi ketika Mesir berhasil meningkatkan produktifitas gandum, dari sebelumnya hanya memproduksi 20% menjadi 60%, meskipun masih banyak kebijakan – kebijakan Presiden Mursi yang belum semuanya terealisasi.⁷ Dalam krisis politik tersebut, pihak militer Mesir sendiri sebelum menggulingkan juga memberikan ultimatum kepada Presiden Mursi selama 48 jam untuk mengatasi krisis internal di Mesir atau meninggalkan jabatan. Tetapi Presiden Mursi hingga akhir jabatan, menganggap kudeta yang akan dilakukan militer Mesir itu tidak sah. Hal ini dikarenakan Mursi menganggap legitimasi kepemimpinannya yang sah lewat jalur demokrasi.

Akhirnya pada tanggal 3 Juli 2013, kepemimpinan sipil Presiden Mursi berhasil digulingkan oleh militer dengan cara kudeta yang dipimpin oleh Jendral Abdul Fattah As Sisi yang kemudian menunjuk Adli Mansur selaku Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjadi Presiden sementara sampai pemilu selanjutnya digelar kembali.

⁶ Rosy Prameswari K, “Keterlibatan Amerika Serikat dalam Penggulingan Muhammad Mursi di Mesir Tahun 2013”. eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 3, Nomor 2, 2015: 362.

⁷ Ibid.

B. Rumusan Masalah

Ditinjau dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan suatu masalah, yaitu: “Apa saja penyebab terjadinya kudeta terhadap Presiden Mesir Muhammad Mursi?”

C. Kerangka Teori

Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis memerlukan kerangka teori. Kerangka teori ini digunakan sebagai landasan teoritis yang relevan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi. Penulis menggunakan Teori Kudeta, dan Konsep Kepentingan Nasional (*National Interest*) untuk mengetahui alasan terhadap penggulingan Presiden Mesir Muhammad Mursi.

1. Teori Kudeta

Secara sederhana, kudeta diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan militer untuk merebut kekuasaan, atau aksi politik untuk menggantikan (mendominasi) suatu kelompok atau rezim yang menjadi saingannya dengan rezim sendiri.⁸ Dalam melakukan kudeta, banyak faktor-faktor yang melatarbelakangi para perwira militer. Namun segala faktor itu tergantung pada kondisi sosial politik yang ada pada masing-masing negara. Yang paling sering menjadi motif militer melakukan kudeta adalah kesalahan-kesalahan yang dilakukan pemerintah sipil yang mengakibatkan menurunnya keabsahan pemerintahan sipil, baik karena pemerintahan sipil yang dianggap tidak bisa mengolah negara dengan

⁸ Eric A. Nordlinger, *Militer Dalam Politik: Kudeta dan Pemerintahan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 150.

baik atau juga karena kesengajaan militer ingin merebut kekuasaan demi kepentingan politiknya.⁹

Kudeta merupakan kegiatan – kegiatan yang dilakukan militer untuk merebut kekuasaan, atau aksi politik untuk menggantikan (mendominasi) suatu kelompok atau rezim yang menjadi saingannya dengan rezim sendiri. (Nordlinger, 1990) Dalam melakukan kudeta, banyak faktor – faktor yang dilatarbelakangi oleh para perwira militer. Namun segala faktor tersebut tergantung pada kondisi politik yang ada pada suatu negara. Yang paling sering menjadi motif militer melakukan kudeta adalah kesalahan – kesalahan yang dilakukan pemerintah sipil yang mengakibatkan menurunnya keabsahan pemerintah sipil, baik karena pemerintah sipil yang dianggap tidak bisa mengolah negara dengan baik atau juga karena kesengajaan militer yang ingin merebut kekuasaan demi kepentingan politiknya. (Nordlinger, 1990)

Menurut Edward Luttwak, ada beberapa persyaratan untuk terjadinya kudeta, yaitu: negara sasaran harus memiliki kemandirian yang besar serta pengaruh kekuatan – kekuatan asing terhadap kehidupan politis internal harus relatif terbatas, dan juga negara sasaran harus memiliki suatu pusat politis. Jika terdapat beberapa pusat maka ini harus jelas bentuknya dan strukturnya harus politis dan bukan etnis. Jika negara dikendalikan oleh unit organisasi yang non-politis, maka kudeta hanya bisa dilaksanakan dengan persetujuan atau netralitas unit tersebut. (Luttwak, 1999, hal. 47)

⁹ Eric A. Nordlinger, *Militer Dalam Politik: Kudeta dan Pemerintahan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 91.

Secara garis besar, ada pra kondisi untuk terjadinya kudeta. pertama, sindrom negara transisi. Di mana pola tradisional sudah rusak sementara pola baru belum terbentuk. Kedua, terjadinya jurang kelas sosial yang tajam akibat dari pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial yang sangat cepat sehingga melahirkan jurang antara kaya dengan miskin. Di mana secara kuantitatif kaum miskin jauh lebih banyak daripada kaum kaya. Ketiga, terjadinya aksi sosial berdasarkan kelompok-kelompok (baik yang sadar politik atau tidak) dan mobilisasi sumber-sumber materil dalam negeri yang rendah.¹⁰

Sejak revolusi tahun 1952, militer Mesir mulai mendapat perhatian dan memperoleh popularitas tersendiri di kalangan rakyat Mesir, karena pada saat itu Mesir mengalami titik balik sistem pemerintahan. Aksi kudeta yang dilakukan oleh pihak militer untuk pertama kalinya dibawah pimpinan Kolonel Gamal Abdul Nasser untuk menggulingkan Raja Farouq pada saat itu. Dari peristiwa tersebut, militer langsung menjadi sorotan dan dianggap sebagai tonggak kekuasaan dan pemrakarsa perubahan baru sejarah Mesir.

Besarnya peran militer Mesir dalam jalannya pemerintahan di Mesir membuat militer selalu berusaha untuk mempertahankan kekuasaan dalam setiap periode pemerintahan yang ada. Karena hal tersebut, membuat peran militer dalam pemerintahan Mesir tidak hanya berfungsi dalam pertahanan keamanan seperti yang seharusnya menjadi tugas militer, namun menjadikan militer lebih berkuasa dan mengatur sistem pemerintahan Mesir, mengingat militer Mesir telah memiliki peran yang signifikan

¹⁰ Eric A. Nordlinger, *Militer Dalam Politik: Kudeta dan Pemerintahan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 141-182.

dalam bidang – bidang sipil, terutama bidang politik dan ekonomi. Selain itu juga, Mesir memang belum siap untuk mengubah sistem pemerintahannya menjadi demokrasi karena masih terdapat banyak permasalahan di dalam negeri Mesir terutama masalah ekonomi dan kesenjangan sosial. Dan juga, militer belum siap untuk melepaskan tahta kekuasaannya yang sudah sedari lama dikuasainya kepada masyarakat sipil, karena militer Mesir tidak percaya bahwa masyarakat sipil dapat membuat keadaan Mesir menjadi lebih baik, militer Mesir juga takut terbongkarnya beberapa arsip pembunuhan terhadap rakyat Mesir dibuka kembali.

2. Teori Politik Luar Negeri

Politik luar negeri merupakan salah satu bidang kajian studi Hubungan Internasional. Politik Luar Negeri merupakan suatu studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspek eksternal akan tetapi juga aspek-aspek internal suatu negara.¹¹ Negara, sebagai aktor yang melakukan politik luar negeri, tetap menjadi unit politik utama dalam sistem hubungan internasional, meskipun aktor-aktor non-negara semakin memainkan peran pentingnya dalam hubungan internasional. Dalam kajian politik luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan eksternal dan domestik sebagai input yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara dipersepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu proses konversi menjadi output. Proses konversi yang terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu negara ini mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun

¹¹ James N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson. 1976. *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press, hal. 15.

internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang dimilikinya.¹² Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.¹³ Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara memang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya meskipun kepentingan nasional suatu bangsa pada waktu itu ditentukan oleh siapa yang berkuasa pada waktu itu.¹⁴ Untuk memenuhi kepentingan nasionalnya itu, negara-negara maupun aktor dari negara tersebut melakukan berbagai macam kerjasama diantaranya adalah kerjasama bilateral, trilateral, regional dan multilateral.

Menurut Rosenau, pengertian kebijakan luar negeri yaitu upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya.¹⁵ Kebijakan luar negeri menurutnya ditujukan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara.¹⁶ Lebih lanjut,

¹² James N. Rosenau, 1980. *The Scientific Study of Foreign Policy*. New York: The Free Press, hal. 171, 173.

¹³ Jack C. Plano dan Roy Olton. 1999. *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Abardin, hal. 5.

¹⁴ Mochtar Mas' oed. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES, hal. 184.

¹⁵ James N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson. 1976. *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press, hal. 27.

¹⁶ *Ibid*, hal. 32

menurut Rosenau, apabila kita mengkaji kebijakan luar negeri suatu negara maka kita akan memasuki fenomena yang luas dan kompleks, meliputi kehidupan internal (internal life) dan kebutuhan eksternal (eksternal needs) termasuk didalamnya adalah kehidupan internal dan eksternal seperti aspirasi, atribut nasional, kebudayaan, konflik, kapabilitas, institusi, dan aktivitas rutin yang ditujukan untuk mencapai dan memelihara identitas sosial, hukum, dan geografi suatu negara sebagai negara-bangsa.¹⁷ Langkah pertama dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri mencakup:

- a. menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional ke dalam bentuk tujuan dan sasaran yang spesifik;
- b. menetapkan faktor situasional di lingkungan domestik dan internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijakan luar negeri;
- c. menganalisis kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki;
- d. mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam menanggulangi variable tertentu sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan tindakan yang diperlukan;
- f. secara periodik meninjau dan melakukan evaluasi perkembangan yang telah berlangsung dalam menjangkau tujuan atau hasil yang dikehendaki.¹⁸

¹⁷ Ibid, hal. 15

¹⁸ Jack C. Plano dan Roy Olton. 1999. Kamus Hubungan Internasional. Bandung: Abardin, hal. 6.

Sementara menurut Holsti, lingkup kebijakan luar negeri meliputi semua tindakan serta aktivitas negara terhadap lingkungan eksternalnya dalam upaya memperoleh keuntungan dari lingkungan tersebut, serta hirau akan berbagai kondisi internal yang menopang formulasi tindakan tersebut.¹⁹

Tujuan dari kebijakan luar negeri sebenarnya merupakan fungsi dari proses dimana tujuan negara disusun. Tujuan tersebut dipengaruhi oleh sasaran yang dilihat dari masa lalu dan aspirasi untuk masa yang akan datang. Tujuan kebijakan luar negeri dibedakan atas tujuan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Pada dasarnya tujuan jangka panjang kebijakan luar negeri adalah untuk mencapai perdamaian, keamanan, dan kekuasaan.²⁰

Sementara itu Plano berpendapat bahwa setiap kebijakan luar negeri dirancang untuk menjangkau tujuan nasional. Tujuan nasional yang hendak dijangkau melalui kebijakan luar negeri merupakan formulasi konkret dan dirancang dengan mengaitkan kepentingan nasional terhadap situasi internasional yang sedang berlangsung serta power yang dimiliki untuk mengjangkaunya. Tujuan dirancang, dipilih, dan ditetapkan oleh pembuat keputusan dan dikendalikan untuk mengubah kebijakan (*revisionist policy*) atau mempertahankan kebijakan (*status quo policy*) ihwal kenegaraan tertentu di lingkungan internasional.²¹ Tujuan politik luar negeri dapat dikatakan sebagai citra mengenai keadaan dan kondisi di masa depan

¹⁹ K.J. Holsti, 1992. *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*. Bandung: Bina Cipta, hal. 21.

²⁰ James N. Rosenau. 1969. *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*. New York: The Free Press, hal. 167.

²¹ Jack C. Plano dan Roy Olton. 1999. *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Abardin, hal. 6.

suatu negara dimana pemerintah melalui para perumus kebijaksanaan nasional mampu meluaskan pengaruhnya kepada negara-negara lain dengan mengubah atau mempertahankan tindakan negara lain. Ditinjau dari sifatnya, tujuan politik luar negeri dapat bersifat konkret dan abstrak. Sedangkan dilihat dari segi waktunya, tujuan politik luar negeri dapat bertahan lama dalam suatu periode waktu tertentu dan dapat pula bersifat sementara, berubah sesuai dengan kondisi waktu tertentu.

Hal ini dapat dilihat bahwa di negara Mesir sendiri terdapat beberapa kepentingan dari beberapa negara asing. Misalnya kepentingan nasional Amerika Serikat dalam bidang politik terhadap Mesir ialah Amerika Serikat merasa khawatir setelah terpilihnya Muhammad Mursi menjadi presiden akan membuat Muhammad Mursi menjadi pemimpin yang besar. Hal tersebut dapat mengakibatkan kelompok Ikhwanul Muslimin dapat mempengaruhi kebijakan – kebijakan internal dan eksternal Mesir. Amerika Serikat beranggapan bila hal itu terjadi, Mesir akan menjadi negara Islam yang dapat mengancam kepentingan nasional Amerika Serikat. Selain itu, dalam bidang ekonomi juga terdapat kepentingan dari Amerika Serikat, yaitu Amerika Serikat yang sangat membutuhkan akses Terusan Suez untuk mendapatkan impor minyak dari Timur Tengah. Disini Amerika Serikat takut jika akses Terusan Suez tersebut tidak dibuka untuk umum lagi. Sedangkan Arab Saudi memiliki kepentingan dalam bidang ideologi yaitu Arab Saudi tidak ingin jika transisi ke sistem pemerintahan demokrasi di Mesir dapat mengakibatkan tuntutan yang serupa terhadap pemerintahan Arab Saudi, sehingga menjadikan ancaman yang serius bagi pemerintahan Arab Saudi dan seluruh keluarga kerajaan.

D. Hipotesa

Mengenai faktor - faktor penyebab terjadinya kudeta terhadap Presiden Mesir Muhammad Mursi, maka dapat ditarik hipotesa:

1. Adanya pra kondisi berupa sindrom negara transisi, jurang kelas sosial yang tajam, dan aksi sosial beberapa kelompok (baik yang sadar politik atau tidak) di Mesir.
2. Adanya faktor eksternal berupa kepentingan dari Amerika Serikat dan Arab Saudi di Mesir.

E. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis bertujuan :

1. Untuk memenuhi syarat wajib lulusan sarjana strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kudeta terhadap Presiden Mesir Muhammad Mursi.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diberikan ataupun disajikan dalam penulisan skripsi ini adalah dapat memberikan informasi mengenai Muhamamd Mursi serta kondisi negara Mesir ketika Muhammad Mursi menjadi presiden. Tidak hanya itu di sajikan juga beberapa permasalahan yang terjadi mesir, serta pihak – pihak yang bersangkutan dalam penggulingan pemerintahan Muhammad Mursi dan alasan – alasan yang menyebabkan Muhamamd Mursi hanya dapat menjabat sebagai Presiden selama setahun dengan dilengkapi peristiwa pengkudetaanya. Selain itu juga guna menerapkan hasil kuliah dalam mata kuliah Teori Hubungan Internasional, Hubungan Internasional di Timur Tengah, Masalah di Dunia Islam, dan Politik Islam di Asia Tengah.

G. Metode Penelitian

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini adalah berupa Library Research, yaitu memanfaatkan data berupa data sekunder yang dikumpulkan dari perpustakaan, buku – buku, jurnal, artikel, laporan, media cetak, media eletronik, website serta kaya ilmiah dan juga skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini.

H. Jangkauan Penelitian

Mengingat luasnya jangkauan Ilmu Hubungan Internasional dan keterbatasan dan minimnya pengetahuan serta pengalaman penulis, maka untuk mempertahankan pembahasan skripsi ini tetap dalam permasalahannya dan tidak menyimpang, maka penulis memberikan batasan ruang lingkup pembahasan yaitu terbatas hanya mengenai latar belakang Muhammad Mursi dari riwayat pendidikan dan keikutsertaanya dalam Ikhwanul Muslimin hingga terpilihnya Muhammad Mursi sebagai presiden Mesir dan jatuhnya pemerintahan Presiden Muhammad mursi tahun 2012-2013. Dimana saat Presiden Mursi belum menjabat menjadi Presiden Mesir pada tahun 2012, ada terdapat banyak aksi demo atau unjuk rasa yang berlangsung pada tahun 2011 sebagai aksi penggulingan Presiden Husni Mubarak. Setelah itu pada tahun 2012 dimulailah babak baru sistem pemerintahan Mesir, dimana Muhammad Mursi berhasil menjadi Presiden Mesir dari kalangan sipil pertama. Selanjutnya, pada tahun 2013 terdapat aksi unjuk rasa kembali yang dilakukan massa dan juga terdapat campur tangan militer guna mengkudeta atau menjatuhkan kedudukan Muhammad Mursi sebagai Presiden Mesir. Dan pada tahun 2013 pula Presiden Muhammad Mursi berhasil digulingkan dari kursi jabatannya sebagai Presiden Mesir.

I. Sistematika Penulisan

BAB I menjelaskan tentang pendahuluan yang memuat tentang Latar Belakang Muhammad Mursi, aksi unjuk rasa

untuk mejatuhkan pemerintahan Husni Mubarak, naiknya Muhammad Mursi menjadi Presiden Mesir terpilih, serta terjadinya kudeta terhadap Muhammad Mursi oleh pihak militer. Selain itu pada bab ini juga terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, dan jangkauan penelitian.

BAB II menjelaskan tentang konflik dalam negeri mesir serta kebijakan – kebijakan Muhammad Mursi selama menjadi Presiden Mesir. Pada bab ini akan dibahas kondisi dalam negeri Mesir mengenai berbagai konflik yang terjadi pasca Muhammad Mursi dilantik sebagai Presiden. Tidak hanya itu, pada bab ini juga mengulas tentang berbagai kebijakan Muhammad Mursi selama menjabat sebagai Presiden Mesir, baik kebijakan dalam negeri maupun luar negeri terkait masalah politik, sosial, ekonomi, militer, serta hubungan/kerjasama Mesir dengan negara – negara lain.

BAB III menjelaskan tentang dinamika kekuasaan dan faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya kudeta terhadap Muhammad Mursi. Dalam bab ini menjelaskan Mesir yang dalam sejarahnya diikuti oleh peranan militer yang aktif, menggambarkan dari awal bagaimana peran militer dalam sosial dan politik di Mesir. Pembahasan perkembangan pemerintahan pasca runtuhnya Mubarak, juga faktor kondisi dalam negeri Mesir yang memburuk tidak sesuai dengan keinginan rakyat sehingga menyebabkan kudeta atas Presiden Mesir Muhammad Mursi. Selain itu, ada juga kepentingan Amerika Serikat yang ikut andil dalam penggulingan Presiden Muhammad Mursi.

BAB IV menjelaskan tentang mengenai apa saja alasan yang membuat Muhammad Mursi dikudeta atau digulingkan dari kursi pemerintahannya, serta kepentingan nasional negara asing yang mendukung terjadinya kudeta

terhadap Presiden Muhammad Mursi. Kepentingan Nasional negara – negara asing tersebut antara lain adalah Kepentingan Nasional Amerika Serikat dan Kepentingan Nasional Arab Saudi.

BAB V merupakan bagian dari kesimpulan pembahasan yang telah diuraikan.